

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Oleh:

Berline Aulea Artha Zahwa¹

Patricia Ika Sari²

Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: bauleaarthazahwa@gmail.com, patriciafebislam@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze infrastructure development in Indonesia through a political economy perspective, highlighting how the interaction between political power, economic interests, and governance shapes the direction and outcomes of development. Infrastructure is not only an economic necessity to drive growth and improve connectivity, but also functions as a political instrument that influences government legitimacy and the distribution of development benefits. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods, combining political economy theories (neoclassical, Marxist, and institutional) with relevant case studies. The results show that infrastructure development in Indonesia is heavily influenced by political dynamics, elite interests, and government relations with the private sector and state-owned enterprises. Large- scale project funding creates fiscal risks and dependence on external investment, while governance issues such as corruption, overlapping regulations, and slow licensing processes hamper development effectiveness. Regional disparities between Java and outside Java remain a major issue, followed by socio-environmental impacts such as land conflicts and unequal distribution of benefits. This study concludes that successful infrastructure development requires more transparent governance, public-needs-based planning, community participation, and a balance between political interests and sustainable development goals.*

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Keywords: *Political Economy, Infrastructure Development, Governance, Public Policy, Fiscal Risk, Regional Inequality, Infrastructure Financing, Sustainable Development.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui perspektif ekonomi politik, dengan menyoroti bagaimana interaksi antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan membentuk arah serta hasil pembangunan. Infrastruktur tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan konektivitas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik yang memengaruhi legitimasi pemerintah serta distribusi manfaat pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memadukan teori ekonomi politik (neoklasik, Marxis, dan institusional) serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan elite, dan relasi pemerintah dengan sektor swasta serta BUMN. Pendanaan proyek yang besar menimbulkan risiko fiskal dan ketergantungan pada investasi eksternal, sedangkan masalah tata kelola seperti korupsi, tumpang tindih regulasi, dan lambatnya perizinan menghambat efektivitas pembangunan. Ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa tetap menjadi isu utama, diikuti dampak sosial–lingkungan seperti konflik lahan dan ketidakmerataan manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur memerlukan tata kelola yang lebih transparan, perencanaan berbasis kebutuhan publik, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan politik dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Pembangunan Infrastruktur, Tata Kelola, Kebijakan Publik, Risiko Fiskal, Ketimpangan Regional, Pembiayaan Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Ekonomi politik merupakan suatu disiplin ilmu yang menelaah hubungan timbal balik antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, pengambilan keputusan politik tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi ekonomi yang ditimbulkannya, demikian pula struktur ekonomi dapat berperan menentukan arah kebijakan politik. Perkembangan disiplin ekonomi politik

sudah muncul sejak abad ke-18 bersamaan dengan pemikiran Adam Smith dan David Ricardo, kemudian memasuki abad ke-20 berkembang menjadi dua aliran besar yaitu ekonomi politik kiri dan ekonomi politik kanan yang masing-masing memiliki fondasi teoritik dan interpretasi berbeda dalam melihat dinamika ekonomi dan kekuasaan. (Febriandiela & Magriasti, 2023).

Selain menjadi akar dari ilmu ekonomi modern, ekonomi politik juga menawarkan sudut pandang filosofis dalam memahami proses produksi, distribusi, dan penggunaan kekayaan dalam masyarakat. Karl Marx menjadi salah satu tokoh yang menempatkan ketimpangan kelas sebagai inti persoalan ekonomi dalam sistem kapitalisme, di mana menurutnya nilai barang berasal dari tenaga kerja namun selisih keuntungan (surplus value) diserap oleh kaum kapitalis melalui eksploitasi tenaga kerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa proses ekonomi tidak berjalan secara netral, tetapi selalu berada dalam pengaruh struktur kekuasaan dan relasi sosial yang ada. (Hasibuan, 2023).

Pembangunan dalam perspektif ekonomi modern dipahami sebagai proses perubahan sosial yang berlangsung secara sistematis, mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, kebudayaan, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Infrastruktur sebagai salah satu elemen pembangunan berfungsi memberikan dukungan fisik bagi aktivitas masyarakat dan ekonomi, meliputi fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, bandara, pelabuhan, jaringan jalan raya, jaringan listrik, hingga sistem air bersih. Keberadaan infrastruktur inilah yang menjadi fondasi untuk memastikan terselenggaranya transaksi barang dan jasa secara efisien dalam suatu wilayah. (Putra et al., 2025)

Pembangunan infrastruktur publik juga dipandang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, perluasan pangsa pasar, penciptaan lapangan kerja, membuka konektivitas antarwilayah, dan menciptakan lingkungan kompetitif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah Indonesia membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk mempercepat dan meningkatkan mutu pembangunan infrastruktur melalui penjaminan proyek sekaligus penyusunan, transaksi, dan pelaksanaan proyek dengan standar terbaik agar lebih menarik bagi investasi dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Meskipun pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses pelayanan dasar masyarakat, dampaknya

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

tidak hanya terletak pada aspek ekonomi. Infrastruktur juga membawa konsekuensi sosial, lingkungan, dan politik yang luas. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efektivitas logistik, daya saing daerah, serta mobilitas penduduk, namun pada saat yang sama perlu dipastikan bahwa pembangunan tersebut benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bukan hanya sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN TEORITIS

Ekonomi politik merupakan bidang keilmuan yang mengintegrasikan perspektif ekonomi dan politik, di mana kedua disiplin ilmu ini memiliki fokus analisis masing-masing namun saling berkaitan. Kajian mengenai ekonomi politik semakin penting karena mampu menjelaskan persoalan besar dunia seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Martin Staniland menegaskan bahwa ekonomi politik merupakan kajian yang memusatkan perhatian pada pertemuan antara proses ekonomi dan dinamika kekuasaan politik dalam kerangka teori. Pendekatan ini menegaskan bahwa kekuasaan politik dapat dijalankan melalui perangkat-perangkat ekonomi. (Febriandiela & Magriasti, 2023)

Analisis ekonomi politik diperlukan untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan dalam sektor ekonomi tidak berdiri sebagai kebijakan murni ekonomi, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial yang berlandaskan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Goldstein menjelaskan bahwa pendekatan liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai aktor utama dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa pasar bebas dipahami sebagai ruang bagi individu untuk mengembangkan dirinya tanpa adanya batasan yang menghambat potensi pertumbuhan. (Dahlan & Wildan, 2022). Staniland pernah menyampaikan sebuah pertanyaan mendasar mengenai hakikat ekonomi politik, yaitu apakah ekonomi politik merupakan teori, pendekatan, atau suatu bentuk persoalan ilmiah. Pertanyaan tersebut menghasilkan berbagai respon, namun bukan untuk memisahkan ekonomi dan politik sebagai dua disiplin ilmu yang berbeda total, melainkan untuk menunjukkan bahwa keduanya saling menyatu dan memengaruhi. Dengan demikian, teori ekonomi politik menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan dinamika politik berinteraksi secara timbal balik serta tidak dapat dianalisis secara terpisah karena keduanya saling membentuk struktur kekuasaan.

Pada dasarnya ilmu ekonomi dan ilmu politik memiliki perangkat analisis yang berbeda, bahkan terkadang asumsi-asumsinya bertolak belakang. Oleh karena itu, ekonomi politik dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan dua bidang tersebut agar dapat menjelaskan persoalan distribusi beban dan manfaat dalam masyarakat. Dengan memahami ekonomi politik, dapat dianalisis bagaimana manusia mengorganisasi aktivitas kolektif, mengelola konflik kepentingan, dan menyalurkan kebutuhan serta keinginannya melalui sistem kekuasaan dan kebijakan publik. (Institute, 2014)

Studi ekonomi politik dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka penahanan pra-persidangan, antara lain pola kepentingan dan insentif yang terstruktur, sistem hukum dan kelembagaan, serta norma sosial dalam masyarakat. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat potensi pembaruan kebijakan, namun perubahan akan tetap menghadapi hambatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sistem yang ada. Dengan demikian, penyelesaian masalah penegakan hukum bukan hanya persoalan aturan tertulis, tetapi juga persoalan politik, budaya, dan kepentingan institusional. Dalam hubungan antara politik dan ekonomi di tingkat internasional, proses ekonomi sering kali membentuk kembali distribusi kekuasaan antarkelompok maupun antarnegara. Politik dapat mengarahkan aktivitas ekonomi guna memenuhi kepentingan kelompok tertentu, namun aktivitas ekonomi juga berpotensi mengubah relasi kekuasaan dan struktur politik. Dengan demikian, dinamika hubungan internasional pada era modern merupakan hasil interaksi timbal balik antara strategi ekonomi dan strategi politik suatu negara.

Infrastruktur dipahami sebagai kumpulan fasilitas yang berasal dari berbagai kegiatan pembiayaan dan pekerjaan publik yang secara historis didukung oleh negara untuk mendorong peningkatan kapasitas sektor privat serta menstimulasi aktivitas konsumsi rumah tangga. Infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, namun juga bersentuhan dengan aspek pertahanan, keberlanjutan pemerintahan, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, peran kebijakan publik dan lembaga pemerintah menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara merata.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga dapat diakomodasi secara tepat.

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mampu menghasilkan proyek yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi risiko konflik sosial dan ketidakpuasan publik. Infrastruktur yang terencana dengan baik akan mendorong produktivitas ekonomi melalui peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, peningkatan daya saing daerah, dan percepatan pertumbuhan sektor ekonomi strategis. (Amalia, 2021). Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap kualitas hidup masyarakat. Dari segi ekonomi, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu daerah atau negara. Jalan yang baik, pelabuhan yang efisien, dan jaringan listrik yang handal, misalnya, dapat membuka akses ke pasar baru, mengurangi biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memadukan teori ekonomi politik (neoklasik, Marxis, dan institusional) serta studi kasus yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pembangunan infrastruktur dari perspektif sosial, politik, dan ekonomi secara mendalam. Pendekatan ini tidak berorientasi pada angka, tetapi pada pemaknaan, interpretasi, dan kontekstualisasi kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan pembangunan infrastruktur tidak hanya teknis-ekonomi, tetapi juga sarat dengan relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan struktur kelembagaan negara. Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fenomena hubungan antara sistem politik dan kebijakan ekonomi, dan menganalisis temuan-temuan tersebut melalui teori ekonomi politik (Marxis, institusional, dan teori kebijakan publik). Jenis penelitian ini cocok karena memberikan ruang untuk menjelaskan fenomena dan menghubungkannya dengan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Neoklasik dalam Pembangunan Infrastruktur

Pendekatan ekonomi politik neoklasik memandang bahwa pembangunan infrastruktur paling efektif dicapai melalui mekanisme pasar yang terbuka serta proses privatisasi. Dalam perspektif ini, pihak swasta dianggap mampu bekerja lebih efisien dan menghasilkan kinerja yang lebih optimal dalam pembangunan maupun pengelolaan

infrastruktur. Pemerintah hanya berperan menetapkan aturan dasar yang mendukung jalannya pasar dengan intervensi yang sangat terbatas. Sementara itu, pembiayaan infrastruktur utamanya bersumber dari investasi swasta dan aktivitas di pasar modal. Pendekatan neoklasik telah menghasilkan beberapa keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur, peningkatan konektivitas Keterkaitan antarwilayah, arus investasi yang meningkat, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi membuat pembangunan infrastruktur di Indonesia kerap dikaitkan dengan dominasi mekanisme pasar bebas dan privatisasi. Dalam praktiknya, sektor swasta memegang peran besar dalam proses pembangunan dan pengelolaan berbagai fasilitas, seperti jalan tol, bandara, maupun pelabuhan. Meskipun demikian, perspektif neoklasik tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Berbagai persoalan muncul, termasuk ketidaksetaraan akses infrastruktur antar daerah dan antar kelompok sosial, munculnya praktik monopoli maupun eksploitasi oleh pelaku usaha, serta dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah ketimpangan, di mana proyek infrastruktur cenderung terkonsentrasi di wilayah yang lebih maju dan mengesampingkan daerah yang masih tertinggal. (Safina et al., 2024).

Infrastruktur sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan atau development dipahami sebagai suatu proses transformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial suatu negara, mulai dari bidang politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, hingga budaya (Alexander 1994). Setiap negara menerapkan berbagai bentuk pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, politik, pendidikan, maupun infrastruktur. Secara umum, infrastruktur mengacu pada penyediaan sarana fisik bagi kepentingan publik, termasuk jalan raya, pelabuhan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, sistem pengolahan limbah, penyediaan air bersih, bandara, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Infrastruktur sendiri berfungsi sebagai komponen struktural perekonomian yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen (Macmillan Dictionary of Modern Economics, 1996). Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan infrastruktur memegang peranan krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi, sebab laju

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan infrastruktur di dalamnya (Maris, 2022).

Akselerasi Infrastruktur di Indonesia dan Tantangannya

Pembangunan infrastruktur menurut (Rifanny Pramesti et al., 2024) di Indonesia selama dekade terakhir ditandai oleh akselerasi proyek fisik besar (jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, data centre, energi), dukungan pembiayaan campuran (APBN, BUMN/SOE, PPP, sovereign wealth/INA, perbankan domestik dan internasional), serta prioritas politik yang kuat dari eksekutif pusat. Upaya ini meningkatkan konektivitas dan potensi pertumbuhan, tetapi menghadapi kendala: pembiayaan jangka panjang, tata kelola (pengadaan & korupsi), permasalahan lahan, ketimpangan wilayah, dan dilema lingkungan/energi dalam transisi menuju energi bersih.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan ekonomi. Infrastruktur bukan hanya proyek teknis, tetapi juga instrumen kekuasaan, legitimasi politik, dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Analisis politik ekonomi menyoroti bagaimana kepentingan pemerintah, aktor politik, sektor swasta, dan masyarakat berinteraksi dalam proses perencanaan, pendanaan, hingga implementasinya (Agus Prianto, 2025). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi Hal ini menjadi krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia (Muhammad Andriansyah, 2023).

Hal ini mendorong adanya kecenderungan politisasi proyek, di mana prioritas pembangunan ditentukan tidak hanya berdasarkan kebutuhan strategis, tetapi juga kepentingan elektoral. Proyek tertentu dapat dipercepat menjelang momentum politik, sehingga keputusan pembangunan kadang kurang mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan evaluasi dampak jangka panjang (Melati et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan (Alnsour et al., 2024).

Interaksi Politik–Ekonomi dalam Pendanaan Infrastruktur

Dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur membuka ruang bagi interaksi erat antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan BUMN Karya. Hubungan antara

kepentingan politik dan kepentingan bisnis sangat kuat karena sektor infrastruktur melibatkan nilai investasi yang besar. Perusahaan-perusahaan besar dan BUMN sering terlibat dalam kompetisi mendapatkan proyek strategis melalui mekanisme tender maupun penunjukan langsung, yang dapat melibatkan lobi politik. Keberadaan relasi antara elite politik dan elite ekonomi dapat mempercepat realisasi proyek, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penumpukan keuntungan pada kelompok tertentu, serta risiko pembengkakan anggaran akibat praktik oligopolistik atau kurang kuatnya sistem pengawasan (Agus Prianto, 2025).

Pendanaan menjadi aspek utama yang menentukan keberhasilan program infrastruktur. Kebutuhan modal yang besar membuat pemerintah mengandalkan skema pembiayaan beragam seperti APBN, menurut (*Iblam Law Review*, 2023) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman luar negeri, hingga pemanfaatan sovereign wealth fund. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal dapat menimbulkan risiko fiskal jangka panjang karena beban utang yang semakin besar. Selain itu, penentuan proyek strategis yang melibatkan investasi asing sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kedaulatan ekonomi dan prioritas pembangunan nasional, terutama pada sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi.

Ketimpangan Wilayah dan Distribusi Infrastruktur

Ketimpangan wilayah juga menjadi isu penting dalam analisis politik ekonomi pembangunan infrastruktur. Secara historis, pembangunan cenderung berfokus pada wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, terutama Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan daerah luar Jawa tertinggal dalam hal konektivitas, akses layanan publik, dan peluang ekonomi. Pemerintah memang telah mendorong lebih banyak proyek di luar Jawa, seperti Trans Sumatera, pembangunan pelabuhan di kawasan timur, serta infrastruktur energi di wilayah terpencil, namun implementasi sering terhambat oleh rendahnya potensi pasar, tantangan geografis, hingga keterbatasan anggaran (Annisa, 2025). Ada beberapa tantangan dalam masalah ekonomi politik seperti yang dijelaskan oleh (Wu et al., 2024), diantaranya :

1. Alokasi politik & prioritas proyek: proyek besar sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik (visibility, legacy), bukan cuma efisiensi ekonomi. Ini berisiko alokasi sumber daya sub-optimal.

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

2. Pembiayaan jangka panjang & risiko fiskal: meski ada alat baru, proyek infrastruktur besar tetap menuntut jaminan/dukungan fiskal yang memperbesar exposure APBN/BUMN.
3. Korupsi & tata kelola pengadaan: pengadaan publik masih rentan; lemah dalam implementasi mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Hal ini mengurangi efisiensi dan menaikkan biaya.
4. Perizinan & akuisisi lahan: hambatan regulasi dan konflik lahan menunda proyek besar. Reformasi hukum lahan dan koordinasi pusat-daerah penting.
5. Ketimpangan regional: banyak investasi terkonsentrasi di Jawa; wilayah timur dan luar pulau masih tertinggal, memicu masalah distribusi manfaat pembangunan. Program seperti Tol Laut berupaya mengatasi ini tetapi tantangannya nyata.
6. Transisi energi & lingkungan: tekanan global untuk dekarbonisasi menambah beban investasi baru (grid, energi terbarukan), sementara pembangunan pembangkit berbasis fosil masih berlangsung — menciptakan trade-offs kebijakan.

Hambatan Tata Kelola dan Regulasi

Kondisi ekonomi politik yang dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan elite, birokrasi yang tidak efisien, dan koordinasi pemerintah yang lemah menyebabkan program pembangunan tidak berjalan optimal. Banyak kebijakan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih pada kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya, proyek yang diprioritaskan sering kali tidak sesuai dengan potensi daerah atau kebutuhan publik (Hadlos et al., 2024). Masalah tata kelola juga menjadi hambatan besar dalam pembangunan infrastruktur. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya mekanisme pengawasan proyek, serta praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mengurangi efektivitas pembangunan. Proses perizinan yang panjang, koordinasi antar lembaga yang tidak sinkron, dan kurangnya transparansi sering memperlambat penyelesaian proyek. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas hasil pembangunan, keterlambatan penyelesaian, serta meningkatnya biaya karena efisiensi yang rendah. Dampaknya terasa langsung pada masyarakat yang seharusnya menikmati infrastruktur secara merata (Perdana & Purba, 2025).

Infrastruktur sebagai Pendorong Investasi dan Konektivitas Ekonomi

Ketersediaan jalan dan infrastruktur yang memadai selalu menjadi fondasi utama bagi arus investasi yang lebih lancar. Banyak negara di berbagai belahan dunia menerapkan strategi perluasan dan pemanjangan jaringan jalan guna memastikan mobilitas komoditas berjalan tanpa hambatan. Mereka berupaya keras meningkatkan kualitas infrastruktur karena diyakini bahwa “ketika pembangunan infrastruktur dipercepat, keuntungan perusahaan dapat diperoleh lebih cepat dan sektor riil berkembang lebih cepat pula” (Kompas: Rabu 20/04/2011). Demi mendorong peningkatan mutu jalan maupun infrastruktur lainnya, Indonesia bahkan pernah menggelar KTT Infrastruktur atau *Infrastructure Summit* pada tahun 2005 (Ridha, 2016).

Selain itu, ketimpangan kapasitas fiskal antara pusat dan daerah membuat daerah tertentu semakin tertinggal. Daerah dengan sumber daya besar dapat berkembang lebih cepat, sementara daerah miskin tetap bergantung pada transfer pusat yang terbatas. Hambatan regulasi dan korupsi juga meningkatkan biaya proyek, mengurangi kualitas infrastruktur, dan memperlambat penyelesaian pembangunan. Penting bagi pemerintah Tujuan ini diperlukan untuk menilai kembali seluruh kebijakan serta program pembangunan secara komprehensif sehingga hasilnya dapat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah (Indrawati et al., 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan politik pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi politik, diyakini bahwa konfigurasi kekuasaan dalam suatu masyarakat memiliki dampak langsung terhadap hasil-hasil ekonomi. Pandangan ini berbeda secara mendasar dari pendekatan ekonomi konvensional yang menganggap distribusi kekuasaan sebagai sesuatu yang sudah tetap dan tidak perlu dipersoalkan. Pemikiran tersebut merupakan perpaduan antara gagasan liberal-kapitalis ala Adam Smith dan konsep liberalisme yang lebih terbatas sebagaimana dikemukakan oleh John Maynard Keynes (Dahlan & Wildan, 2022),

Setiap negara menempatkan kestabilan ekonomi sebagai prioritas utama bagi kesejahteraan masyarakatnya. Stabilitas ini sangat penting karena tanpa kondisi ekonomi yang solid, berbagai persoalan seperti pertumbuhan ekonomi yang melemah, tingginya angka pengangguran, serta meningkatnya inflasi dapat muncul. Dalam kajian ekonomi

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

makro, terdapat sejumlah variabel yang saling berkaitan dan bersama-sama menentukan kondisi stabil tidaknya suatu perekonomian. Situasi Indonesia kerap dianggap tidak stabil karena beberapa faktor, salah satunya inflasi yang tinggi, yang biasanya dipicu oleh krisis global, lemahnya pengelolaan ekonomi, rendahnya kapasitas produksi, serta perubahan sistemik dalam struktur ekonomi. Pembangunan sendiri dapat dipahami sebagai proses perubahan yang dirancang secara sengaja melalui kebijakan dan strategi untuk mengarahkan transformasi ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan dalam kebijakan keuangan, misalnya, dapat terlihat dari percepatan inovasi di sektor industri maupun jasa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Rahmatullah et al., 2023).

Menurut Sari (2023), ekonomi politik internasional dipahami sebagai hubungan timbal balik yang terus berkembang antara upaya memperoleh kekuasaan dan kekayaan dalam arena hubungan antarnegara. Pemahaman ini menegaskan bahwa ekonomi politik internasional bukanlah sekadar cabang ekonomi yang hanya membahas persoalan teknis, dan juga bukan teori politik murni yang menganggap aspek ekonomi semata-mata sebagai instrumen politik. Lebih jauh, teori ini berperan untuk menguraikan keterkaitan kompleks antara faktor ekonomi dan politik, serta hubungan antara pasar dan negara dalam konteks global. Sejak masa Revolusi Industri pada abad ke-16, dimensi ekonomi dalam sistem internasional telah memegang peranan dominan. Tuntutan terhadap bahan baku, pasar, tenaga kerja, energi, dan teknologi membuat pengaruh ekonomi dalam dinamika politik internasional semakin menguat.

Perlu dipahami bahwa era Orde Baru merupakan periode yang sangat menentukan, baik dalam perkembangan politik maupun ekonomi Indonesia. Karakter pemerintahan yang bersifat otoriter pada masa tersebut mengakibatkan berbagai bentuk pembatasan di hampir semua bidang, mulai dari ranah politik, hukum dan regulasi, sektor ekonomi, hingga kebebasan pers dan aspek-aspek lainnya (Hudi, 2020). Setiap negara menginginkan kemajuan, dan pertumbuhan ekonomi, maka akses mobilitas dalam distribusi barang maupun jasa masyarakat sangat diperhatikan. Hal tersebut dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur akan berdampak terhadap peningkatan produk domestik dan menyerap tenaga kerja.

Pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, jembatan, dan fasilitas lainnya dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dunia usaha serta

memperbaiki pelayanan publik dan layanan infrastruktur secara keseluruhan. Tujuan utama dari pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sejalan dengan itu, pembangunan yang dijalankan saat ini merupakan langkah percepatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mencatat pendapatan per kapita Indonesia mencapai \$4.174,9, dan menurut World Bank, Indonesia dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah yang pertumbuhannya meningkat namun belum signifikan sehingga masih digolongkan sebagai negara berkembang (Rodzi, 2023).

Infrastruktur yang memadai berperan besar dalam mendorong produktivitas berbagai sektor ekonomi penting, termasuk perdagangan, industri manufaktur, dan jasa. Sistem transportasi yang terhubung dengan baik memudahkan mobilitas barang maupun orang, menekan biaya logistik, serta memperkuat daya saing pelaku usaha di dalam negeri (Anisa et al., 2024). Dampak akhirnya, manfaat pembangunan tidak merata. Wilayah perkotaan dan pusat ekonomi besar lebih cepat menikmati infrastruktur dan layanan publik, sedangkan daerah terpencil tetap mengalami akses terbatas. Hal ini memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi dan mengurangi efektivitas pembangunan nasional secara keseluruhan (Xu et al., 2025).

Dampak Sosial–Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara kajian politik berperan penting untuk memahami berbagai dinamika yang muncul dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat sejumlah poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan:

1. Faktor politik, seperti kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan dinamika kekuasaan, memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan infrastruktur dan distribusi manfaatnya di masyarakat.
2. Proyek-proyek infrastruktur sering menjadi objek konflik politik antara berbagai para aktor terkait, baik pada level daerah, tingkat nasional, maupun pada lingkup global.
3. Dampak pembangunan infrastruktur tidak selalu merata di seluruh masyarakat, dengan beberapa kelompok mungkin mengalami ketimpangan akses atau manfaat yang signifikan.

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

4. Partisipasi pembanguna dalam proses pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka dipertimbangkan secara adil.
5. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi cara proyek-proyek tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan, dengan dampak politik yang signifikan.
6. Kerja sama antara beragam pihak yang berkepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan tujuan tersebut. pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif (Hasibuan, 2023).

Dampak sosial dan lingkungan turut menjadi bagian dari dinamika politik ekonomi pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan sering memunculkan konflik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat lokal. Banyak kasus penggusuran yang tidak memberikan kompensasi layak sehingga menimbulkan ketidakpuasan sosial. Selain itu, proyek besar seperti bendungan, kawasan industri, atau jalan raya sering memengaruhi kondisi ekologis, menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan struktur sosial ekonomi komunitas sekitar. Ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat menjadi isu yang belum sepenuhnya tertangani (Judijanto et al., 2025).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi penggerak penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang baik dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas akses pasar, menarik investasi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal jika perencanaan dilakukan secara rasional, tata kelola diperkuat, dan prioritas pembangunan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang, bukan sekadar kepentingan politik (Yaqin et al., 2025).

Secara umum, kajian ekonomi politik menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur ditentukan oleh hubungan antara kekuatan politik, kepentingan ekonomi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh, diperlukan praktik transparansi,

akuntabilitas, serta komitmen yang kuat dalam menyeimbangkan kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat. Karena itu, kerja sama yang solid di antara seluruh pihak terkait menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur mampu menghasilkan manfaat yang luas serta bertahan dalam jangka panjang. Kolaborasi tersebut juga harus membuka ruang bagi peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan infrastruktur pun dapat memperkuat rasa kepemilikan serta tanggung jawab terhadap proyek yang dijalankan, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan di masa depan (Pasha et al., 2024).

KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan proses yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang membentuk arah, prioritas, serta distribusi manfaat pembangunan. Infrastruktur menjadi instrumen penting bagi negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembangunan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga prosesnya tidak sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan strategis atau pemerataan wilayah. Interaksi antara elite politik, BUMN, dan sektor swasta memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan arena yang sarat dengan perebutan kepentingan ekonomi dan politik. Pendanaan yang bergantung pada APBN, skema KPBU, BUMN, dan investasi asing menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menghadapi risiko fiskal dan ketergantungan yang perlu dikelola secara hati-hati. Selain itu, masalah tata kelola seperti tumpang tindih regulasi, korupsi pengadaan, dan lambatnya proses perizinan memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan masih harus diperkuat untuk mendukung pembangunan yang efektif dan akuntabel.

Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa juga menjadi temuan penting. Meskipun pembangunan meningkat pesat, distribusinya belum merata sehingga daerah dengan kapasitas fiskal rendah masih tertinggal dalam akses layanan publik dan konektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

mampu menjawab persoalan pemerataan dan inklusivitas. Dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga memunculkan konsekuensi yang harus diperhitungkan, seperti konflik lahan, penggusuran, kerusakan lingkungan, serta perubahan struktur sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari kebijakan infrastruktur.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada bagaimana negara mampu menyeimbangkan kepentingan politik, kebutuhan ekonomi, dan nilai-nilai keadilan sosial. Ke depan, diperlukan tata kelola yang transparan, perencanaan berbasis data, penguatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang merata, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan kualitas hidup seluruh warga Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Prianto. (2025). Political Economy of Infrastructure Development and Capital Interests: A Case Study of Infrastructure Development in Banyu Biru Village, Pasuruan Regency. *Best Journal of Administration and Management*, 3(3), 203–210. <https://doi.org/10.56403/bejam.v3i3.277>
- Alnsour, M., Al-Omari, Z., Rawashdeh, T., & Oudat, A. (2024). Shaping Tomorrow's Community Requires Right Decisions to be Made Today Through Investment in Sustainable Infrastructure: An International Review. *Evergreen*, 11(3), 1508–1529. <https://doi.org/10.5109/7236808>
- Amalia, D. (2022). (2021). *Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Pemba*. 4(1), 1–11. Analisis Ekonomi Politik Neoklasik dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Article in Journal of MISTER Available at Cite This Article APA*, 1(2), 137–142.
- Anisa, S. N., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis Peran Annisa, A. (2025). Econometric Spatial Modeling to Analyze Interregional Development Inequality in Indonesia. *Journal of Applied Econometric*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/10.64910/journaljoae.v1i2.26>
- Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi Pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 105–122. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.6165>
- Febriandiela, F., & Magriasti, L. (2023). *Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia dan Tanggapan Masyarakat di Desa Panti Sumatera Barat*. 79–88.
- Hadlos, A., Opdyke, A., Hadigheh, S. A., & Gato, C. (2024). Pathways of multi-hazard post- disaster housing reconstruction among Ivatan Indigenous households. *Journal of Building Engineering*, 91(February), 109636. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.109636>
- Hagins, H., Kopec, J. A., Brooks, P. M., Woolf, A. D., Kopansky-Giles, D. R., Walton, D. M., Treleaven, J. M., Dreinhoefer, K. E., Betteridge, N., Abbasifard, M., Abbasi-Kangevari, Z., Addo, I. Y., ... March, L. M. (2024). Global, regional, and national burden of neck pain, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Rheumatology*, 6(3), e142–e155. [https://doi.org/10.1016/S2665-9913\(23\)00321-1](https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00321-1)

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

- Hasibuan, J. M. K. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat: Suatu Analisis Politik. *Literacy Notes*, 1–11. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/82%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/82/108>
- Hudi, M. (2020). Peran Politik pembangunan ekonomi. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 232–248.
- Iblam law review. (2023). 162–179.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>
- Institute, T. W. (2014). Politik Ekonomi. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- Judijanto, L., Suharto, S., Lukiyanto, K., Ali, H., Atutik, W. S., & Aswirawan, M. Y. M. S. K. (2025). Infrastructure Development Inequality: When Big Projects Sacrifice Local Access. *Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting*, 2(2), 72–83. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i2.292>
- Kerja dan Durasi Kerja terhadap Keluhan Neck Pain pada Pekerja di Kantor Diskominfo Sumedang Tahun 2023. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v4i1.10328>
- Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 109–124. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/9114>
- Maris, EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA, (2022)
- Muhammad Andriansyah. (2023). 07.+Edison+134-146. *Jurnal Development*, 11(2), 134–147. <https://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/view/323>
- Pasha, E. I., Sari, M. M., & Rohimi, U. E. (2024). Sustainable Economy: Integrating Environmental Policy in Infrastructure Development in Developing Countries.

Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah, 3(2), 54–61.
<https://doi.org/10.57096/hawalah.v3i2.47>

- Perdana, S., & Purba, A. S. (2025). Principles of Good Governance in Regional Government in Advancing Regional Infrastructure Development. *Science of Law*, 2025(1), 119–123. <https://doi.org/10.55284/jg55bh17>
- Putra, A. K. S., Velandi, Y. V., & Rangga. (2025). Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(June), 19–25.
- Rahmatullah, Dinar, M., & Marhawati. (2023). *Ekonomi Politik (Teori dan Implementasinya)*.
- Ridha, M. (2016). EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEPENTINGAN KAPITAL. 18.
- Rifanny Pramesti, M. Ahmad Djojosingito, & Febriana Kurniasari. (2024). Hubungan Postur
- Rodzi. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151–163.
- Safina, S., Saepudin, E. A., Damayanti, A. S., Yani, L. R., Edista, L., & Cahyani, S. (2024).
- Sari, E. (2023). Analisis Ekonomi Politik Tarif Smoot-Hawley: Dampaknya Pada Perdagangan Internasional Dan Hubungan Bilateral. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 55–63.
<https://doi.org/10.24042/tps.v19i2.18196>
- Wu, A. M., Cross, M., Elliott, J. M., Culbreth, G. T., Cousin, E., Haile, L. M., Steinmetz, J. D.,
- Xu, X., Zhang, Y., Wang, Y., Zhao, C., Zhang, Y., & Xie, X. (2025). Impact of regional digital transformation on public health: an empirical analysis based on 31 provinces in China. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23670-8>
- Yaqin, A. M. A., Putri, A. A., Leksono, V. A., Setiowati, N. O., Efranto, R. Y., & Nabiha, H. D. P. (2025). Descriptive and predictive analyses of carbon emissions in Indonesia: a multifaceted approach incorporating stock market and commodity

ANALISIS POLITIK EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

prices. *Carbon Management*, 16(1).
<https://doi.org/10.1080/17583004.2025.2496482>